

LAMPIRAN

A. TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Narasumber

Nama Lengkap : Brigjen TNI Jati Bambang Priyambodo, S.I.P.,
M.A.P.
Posisi : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen
Kemhan
Lama Bertugas : 1 Tahun
Instansi : Setjen Kemhan

Pelaksanaan

Hari/tanggal/tahun : 27 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d. 09.15
Durasi : 15 menit
Tempat : Kantor Biro Ortala Setjen Kemhan
Apakah ada file diterima : Ya / Tidak
Jika Ada, sebutkan :
Kode :

Beberapa waktu lalu (8 November 2021) kami sudah melaksanakan wawancara dengan Kasubbag Kelembagaan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Roortala Setjen Kemhan yaitu Ibu Irene Novri Amalia terkait Pembentukan Pusat Cadangan Logistik Strategis (PCLS) yang menjadi Satker baru di lingkungan UO Kemhan. PCLS adalah terobosan baru dalam mengatasi krisis dampak pandemik bahwa program ini muncul dikarenakan kondisi pandemi, kondisi ekonomi menurun melemah, dan belum ada solusi sama sekali. Presiden memberikan perintah untuk mendirikan ini. Menhan waktu itu

mendapatkan perintah langsung dari Presiden untuk melaksanakan tugas cadangan logistik. PCLS adalah embrio bentuk organisasi BCLS dimana memang ketika membentuk BCLS, tugasnya itu untuk mewujudkan ketersediaan cadangan pangan guna mendukung pertahanan negara.

Terkait pernyataan Kasubbag Kelembagaan di atas ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kami tanyakan:

A. KESIAPAN

1. Menurut Bapak Karoortala apa yang menjadi latar belakang diterbitkannya Kepmenhan terkait UPT PCLS?

Sebenarnya yang mau didirikan adalah Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS) sebagai tindak lanjut peringatan FAO terkait ancaman krisis pangan akibat dari Pandemi Covid 19, selanjutnya Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan kebijakan *Food Estate* masuk ke dalam Program Strategis Nasional dan Kemhan berperan sebagai salah satu bagian pendukung program *Food Estate* ini melalui program Cadangan Logistik Strategis (CLS), namun untuk mendirikan suatu organisasi apalagi dibiayai oleh negara diperlukan dasar hukum yang memayunginya. Atas perintah Menhan Biro Ortala Setjen Kemhan menginisiasi penyusunan perpres dalam rangka pendirian BCLS, karena proses penyusunannya membutuhkan koordinasi dengan yang baik dengan K/L lainnya serta butuh waktu cukup lama, agar pelaksanaan program CLS oleh Kemhan dapat berjalan sesegera mungkin, secara paralel dibuatkan Keputusan Menhan terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis PCLS dalam rangka menunjuk pejabat ataupun sebagai syarat untuk mendapat anggaran dari Kemku. Atas dasar Kepmenhan tersebut dapat dibuatkan Surat Perintah kepada pejabat PCLS yang sifatnya

masih sementara dan dapat diajukan dasar untuk mengajukan kode Satker kepada Kemkeu dalam rangka penyusunan Anggaran PCLS Tahun 2021 dan tahun selanjutnya, jika nantinya Perpres tentang BCLS ditandatangani PCLS berubah menjadi BCLS.

2. Apakah ada hambatan ataupun kendala PCLS ini?

Dasar hukum masih menggunakan Keputusan Menteri Pertahanan sehingga Dalam proses pembentukan PCLS ini terutama proses penyusunan Perpres, sudah melibatkan berbagai stakeholder terkait, sehingga dalam penyusunan aturan hukumnya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan jangan sampai bersinggungan dengan Tugas dan Fungsi K/L lainnya. Terkait cadangan logistic strategis Kemhan ini hanya mengolah komoditas singkong yang akan diolah menjadi produk bahan makanan (tepung tapioka, mie instan, dll), bahan biomedis farma dan energy/bahan bakar.

3. Sebelumnya disampaikan bahwa konsep/rancangan Perpres sudah posisi di istana sejak Juli 2021 tahun lalu, apakah ada gambaran kapan Perpres ini ditandatangani atau malah tidak ditandatangani oleh Presiden?

Kami dan staf senantiasa koordinasi dengan pihak terkait di Kemensesneg menanyakan perkembangan Perpres BCLS. Kewenangan kami hanya sebagai pemrakarsa penyusunan Perpres dengan melibatkan K/L terkait, kami tidak bisa memastikan hal tersebut.

4. Bagaimana kesiapan perencanaan organisasi PCLS dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara?

PCLS atau pusat cadangan logistik ini adalah organisasi yang dibentuk oleh kementerian pertahanan dalam rangka sebagai bridging terbentuknya BCLS (Badan Cadangan Logistik Strategis). Jadi karena BCLS harus ditetapkan dengan perpres maka itu membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam rangka antisipasi itu dibentuklah PCLS (organisasi sementara), tujuannya pada saat itu adalah sebagai organisasi sementara untuk menerima turunya dana dari Kemenkeu.

5. Bagaimana kesiapan pengorganisasian SDM PCLS?

Dari segi pengorganisasian PCLS didasari dengan Keputusan Menteri Pertahanan yaitu Kepmenhan Nomor 65 Tahun 2021 dengan Struktur dipimpin oleh Kepala PCLS dibantu oleh Kabag TU dan empat Kepala Bidang beserta beberapa staf sehingga segala persiapan baik berupa administrasi maupun kesiapan koordinasi lainnya dapat berjalan dengan baik.

6. Bagaimana kesiapan fasilitas PCLS?

Saat ini fasilitas yang ada di PCLS adalah sarana perkantoran yang sebenarnya milik satker tempat dimana pejabat/staf PCLS berdin. Sementara untuk kesiapan berupa lahan siap tanam sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR seluas kurang lebih 630 ha, yang didukung dengan dua unit sumur bor, serta solar cell untuk pasokan listrik hanya untuk penerangan. Akses jalan dari jalan raya sepanjang 10 km.

7. Bagaimana Kesiapan pengendalian fasilitas PCLS?

Pengendalian PCLS akan dilaksanakan oleh Kepala PCLS yang dibantu oleh para staf.

B. HAMBATAN

1. Faktor apa saja yang membatasi kesiapan perencanaan PCLS?
2. Faktor apa saja yang membatasi kesiapan pengorganisasian PCLS?
3. Faktor apa saja yang membatasi kesiapan penggunaan fasilitas PCLS?
4. Faktor apa saja yang membatasi kesiapan pengendalian fasilitas PCLS?
5. Apa saja yang menjadi kendala pengarahannya dalam pengendalian fasilitas PCLS?
6. Faktor apa saja yang menahan kapasitas maksimal organisasi/institusi dalam melaksanakan fasilitas PCLS?
7. Faktor apakah yang dapat membatasi implementasi PCLS apabila dilihat dari luar perencanaan, pengelolaan (pengaruh aspek politik, hukum, atau sosial yang membatasi perencanaan) ?
8. Faktor apa saja yang menahan perencanaan dan pengelolaan PCLS untuk tercapainya tujuan *Food Estate*?
9. Apa saja yang menghambat proses koordinasi dalam menyelaraskan tujuan dari pengelolaan PCLS?
10. Faktor apa saja yang menghambat pengorganisasi teknis dan non-teknis dalam pengelolaan PCLS?

C. UPAYA

1. Apa tujuan PCLS?

PCLS atau pusat cadangan logistik ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dalam rangka sebagai bridging terbentuknya BCLS (badan cadangan logistik strategis). Jadi karena BCLS harus ditetapkan dengan perpres maka itu membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam rangka antisipasi itu dibentuklah PCLS (organisasi sementara), tujuannya pada saat

itu adalah sebagai organisasi sementara untuk menerima turunnya dana dari Kemenkeu.

2. Apa saja sarpras yang diperlukan untuk pengelolaan PCLS?
 Fasilitas PCLS pada awalnya ya memang sementara, jadi fasilitas yang digunakan adalah dari satuan tempat para personil bertugas. Contohnya orang yang bertugas di pos Baranahan Kemhan maka orang tersebut tetap di pos Baranan Kemhan tetap melaksanakan tugas utama kemudian di sela-sela itu menjalankan tugas dari PCLS.
3. Bagaimana cara mengelola PCLS?
 Pengendalian: Misal meeting itu mengumpulkan dari berbagai pos dan membahas permasalahan PCLS (meminjam tempat rapat terdekat misal di baranahan) Organisasi: dipimpin oleh seorang kepala pusat cadangan logistik strategis (bapak marahmat) dibantu oleh seorang kepla bagian tata usaha dan 4 kepala bidang lainnya yaitu perencanaan pengembangan, sarana prasarana, dan pengelolaan budidaya tanaman.
4. Hingga saat ini, bagaimana upaya yang telah diterima instansi militer dan nonmiliter dalam mempersiapkan PCLS?
 Organisasi PCLS selanjutnya akan disusun ulang oleh bagian kepegawaian dan personilnya. Kegiatan yang dilaksanakan PCLS: Melaksanakan persiapan-persiapan terkait dengan anggaran yang akan diturunkan pada tahun 2022 (perencanaan kegiatan, pendampingan team monitoring lapangan). Bagaimana kesiapan instansi militer dan nonmiliter dalam melaksanakan upaya pengelolaan PCLS?
5. Strategi apa yang akan dijalankan oleh PCLS guna memenuhi amanat perundang-undangan terkait pencapaian *Food Estate*?
6. Apa langkah dan upaya yang perlu dijalankan dalam pembentukan PCLS?

7. Apa langkah dan upaya yang perlu dijalankan dalam melakukan penguatan PCLS?
8. Bagaimana bentuk pengendalian/*controlling* langkah-langkah berjalannya strategi pembentukan PCLS.

PENELITIAN TESIS ANDI SUNRA
KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Narasumber

Nama Lengkap : Marsma TNI Muhamad Idris, S.H., M.H.
Posisi : Kepala Biro Peraturan dan Perundang-undangan
Lama Bertugas : 1 Tahun
Instansi : Setjen Kemhan

Pelaksanaan

Hari/tanggal/tahun : 3 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d. 09.15
Durasi : 15menit
Tempat : Kantor Biro Turdang Setjen Kemhan
Apakah ada file diterima : Ya / Tidak
Jika Ada, sebutkan :
Kode :

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

- 1. Apa yang melatarbelakangi pendirian PCLS yang akan menjadi Badan Cadangan Logistik Strategis yang akan dikelola oleh Kemhan?**

Jawaban: PCLS dengan dasar Kepmenhan ditetapkan dalam rangka mempermudah pengurusan anggaran yang akan diterima oleh Kemhan pada Tahun 2021 maupun 2022 atau tahun selanjutnya terkait program cadangan logistik strategis yang akan dikelola oleh Kemhan, Begitu Perpres tentang BCLS ditandatangani oleh Presiden, maka otomatis PCLS akan menjadi Badan Cadangan Logistik Strategis. Secara parallel anggaran sudah siap sambil menunggu perpres terbit.

- 2. Apakah program *Food Estate* ini tidak bersinggungan dengan tugas dan fungsi K/L/Instansi pemerintah lainnya? Yang membedakan program *Food Estate* Kemhan dengan K/L/Instansi pemerintah lainnya?**

Jawaban. Tentu akan ada yang bersinggungan, Saat ini Kemhan dalam hal ini Biro Turdang Setjen Kemhan juga dilibatkan untuk memberikan saran/masukan atas RPerpres terkait *Food Estate* yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Food Estate* yang akan dikelola oleh Kemhan hanya komoditas singkong yang akan membedakan dengan *Food Estate* lainnya, seperti Perpres Nomor 66 tentang Badan Ketahanan Pangan yang mengelola beberapa macam komoditas tapi tidak termasuk singkong.

- 3. Apakah ada hambatan ataupun kendala terkait regulasi maupun kelembagaan BCLS ini?**

Jawaban. Dalam proses penyusunan RPerpres, harmonisasi dengan melibatkan K/L/Instansi pemerintah lainnya yang terkait

sudah dilaksanakan dengan baik, Kemensesneg juga sudah mengirim draft RPerpres tersebut ke Presiden namun sampai dengan saat ini RPerpres tersebut belum ditandatangani. Hambatannya adalah tidak ada seorang pejabat negarapun yang bisa meminta Presiden untuk menandatangani Perpres. Kita tunggu kabar saja

4. Upaya yang dilakukan dalam rangka penandatanganan konsep/rancangan Perpres yang sudah posisi di Istana sejak Juli 2021.

Jawaban. Kami sudah maksimal, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita hanya bisa menunggu RPerpres ditandatangani.

5. Apakah ada gambaran kapan Perpres ini ditandatangani atau malah tidak ditandatangani oleh Presiden? Apakah ada batas waktu draft Perpres untuk penandatungannya, misalnya draft sudah di Presiden selama 6 bulan, 1 tahun sehingga kita bisa dapat kepastian bahwa jika sudah melebihi waktu tersebut draft perpres tidak akan ditandatangani.

Jawaban.

Perpres BCLS sepertinya masih jauh ditandatangani oleh Presiden, kemungkinan menunggu Perpres tentang *Food Estate* yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu ditandatangani. Terkait batas waktu itu, tidak ada ketentuan, terserah presiden saja.

**KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS
DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA**

DATA RESPONDEN

- Nama : Toro Djulianto, S.H., M.Si
- Posisi : Kabag Induk PNS Biro Kepegawaian Setjen
Kemhan
- Lama Bertugas : 2 (dua) tahun
- Instansi : Kementerian Pertahanan RI

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

ROPEG SETJEN KEMHAN

Topik: Kesiapan personel organisasi PCLS dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara?

1. Bagaimana mekanisme Ropog Setjen Kemhan merekrut SDM untuk PCLS ?

Jawaban : Secara umum

- ✓ Membuat Surat Permintaan Penyusunan Rencana Kebutuhan pegawai ke Satker/Subsatker Kemhan berdasarkan analisis jabatan, dan analisis beban kerja serta jenis dan jumlah jabatan sesuai kualifikasi pendidikan
- ✓ Menghimpun dan mengusulkan kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
- ✓ Melakukan entry data dari hasil penyusunan rencana kebutuhan pegawai ke dalam sistem aplikasi e-formasi
- ✓ Menteri PANRB melakukan verifikasi dari hasil entry data oleh Kementerian Pertahanan

- ✓ Kemudian Menteri PANRB hasil dari verifikasi menetapkan Kebutuhan Pegawai Kementerian Pertahanan
 - ✓ Membuat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kebutuhan Pegawai Kementerian Pertahanan dan Pembentukan Panitia Seleksi Instansi Kementerian Pertahanan
 - ✓ Melakukan seleksi Pengadaan Pegawai Kementerian Pertahanan, mulai Perencanaan, pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi, Pengangkatan dan Masa Percobaan Menjadi Calon PNS serta Pengangkatan menjadi PNS.
2. Apa pemahaman SDM untuk PCLS di sini, apakah dari TNI, POLRI, PNS dan PPPK?

Jawaban: Bahwa dalam rangka merekrut SDM untuk Satuan Kerja Pusat Cadangan Logistik Strategi (PCLS) terkait jenis jabatan yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, mekanisme rekrutmen dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan secara umum sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam suatu satuan organisasi, tetapi apabila terkait jenis jabatan yang dapat diduduki selain Pegawai Negeri Sipil harus mempertimbangkan syarat dan jenis jabatan berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara beserta turunannya dan dapat juga dilakukan melalui *assessment center* untuk mengetahui potensi dan kompetensi yang dimiliki Pegawai yang akan menduduki ke dalam jenis jabatan yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Sepanjang formasi jenis dan jumlah jabatan yang akan dibutuhkan dituangkan dalam Daftar Susunan Pegawai (DSP). Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian atau Lembaga lain yang tugas dan fungsinya terkait menangani logistik.

3. Apakah diperlukan pendidikan khusus pengembangan SDM bagi SDM yang sudah direkrut ?

Jawaban: Dalam rangka pengembangan karir bagi pegawai yang akan menduduki ke dalam jabatan di Satuan Kerja Pusat Cadangan Logistik Strategi (PCLS) kalau memang dalam syarat jabatan sangat dibutuhkan dan harus memiliki kompetensi khusus tentu saja perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

4. Terkait perawatan SDM PCLS, apa yang menjadi hak SDM PCLS ?

Jawaban : Yang menjadi hak SDM PCLS tergantung siapa yang menduduki ke dalam jabatan dimaksud, apakah dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia masing-masing sudah diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kalau berbicara hak tergantung SDM apa dimaksud di sini kalau Pegawai Negeri Sipil tentu haknya meliputi gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi, sedangkan kalau dari PPPK perbedaan dengan Pegawai Negeri Sipil hanya tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

5. Bagaimana mekanisme pemisahan personel, pengunduran diri, pemecatan atau pensiun ?

Jawaban : pemisahan personel, pengunduran diri, pemecatan atau pensiun tentu akan berbeda dengan mekanisme apabila yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. Pemisahan personel karena mengundurkan diri terpenting adalah yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan

dan ditandatangani menggunakan materai 10.000,- serta diusulkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Pemisahan personel karena pemecatan umumnya yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat atau pelanggaran hukum pidana yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap.
- c. Pemisahan personel karena pensiun yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun dan diusulkan oleh pejabat yang berwenang dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi meliputi DPCP, Fotokopi SK pertama, SK terakhir, surat nikah, akte kelahiran, foto 4 X 6 cm 5 (lima) lembar, SKP bernilai baik dan Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat
- d. Apabila yang dimaksud personel TNI proses penyelesaiannya di Bagian Watpeg Ropeg Setjen Kemhan melalui Kas Angkatan masing-masing.

**KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS)
SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS
DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA**

DATA RESPONDEN

- Nama : Kol Czi. Wahyu Widisetyanta, M.Si.
- Posisi : Kabag TU PCLS
- Lama Bertugas : 1 (satu) tahun
- Instansi : Kementerian Pertahanan RI

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Topik: Sejauh mana kesiapan PCLS dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara.

1. Bagaimana apa itu PCLS dan proses terbentuknya PCLS?

Jawaban :

PCLS atau pusat cadangan logistik ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dalam rangka sebagai *bridging* terbentuknya BCLS (Badan Cadangan Logistik Strategis). Jadi karena BCLS harus ditetapkan dengan perpres maka itu membutuhkan waktu yang lama sehingga dalam rangka antisipasi itu dibentuklah PCLS (organisasi sementara), tujuannya pada saat itu adalah sebagai organisasi sementara untuk menerima turunya dana dari Kemenkeu. Kemudian dari PCLS ini, karena sementara jadi organisasinya belum struktural dengan SDM diisi oleh personil yang ada di bidang pertahanan yang dianggap mempunyai kemampuan untuk keberlangsungan PCLS. PCLS dibentuk anggota ditambah dari Baranahan dan badan-badan lain untuk melengkapi SDM yang ada.

2. Bagaimana dengan kesiapan fasilitas-fasilitas di PCLS?

Fasilitas PCLS pada awalnya ya memang sementara, jadi fasilitas yang digunakan adalah dari satuan tempat para personil bertugas. Contohnya orang yang bertugas di pos Baranan Kemhan maka orang tersebut tetap di pos Baranan Kemhan melaksanakan tugas utama kemudian di sela-sela itu menjalankan tugas dari PCLS. Pengendalian: Misal meeting itu mengumpulkan berbagai pos dan membahas permasalahan PCLS (meminjam tempat rapat terdekat misal di Baranahan) Organisasi: dipimpin oleh seorang kepala Pusat Cadangan Logistik Strategis (Bapak Marahmat) dibantu oleh seorang kepala bagian tata usaha dan 4 kepala bidang lainnya yaitu perencanaan, pengembangan, sarana prasarana, dan pengelolaan budidaya tanaman.

3. Bagaimana dengan organisasi PCLS?

Organisasi PCLS selanjutnya akan disusun ulang oleh bagian kepegawaian dan personilnya. Kegiatan yang dilaksanakan PCLS: Melaksanakan persiapan-persiapan terkait dengan anggaran yang akan diturunkan pada tahun 2022 (perencanaan kegiatan, pendampingan tim, dan monitoring lapangan). Aspek politik hukum dan sosial perencanaan: pembentukan UPT PCLS ini berdasarkan Kepmenhan dan personilnya diisi oleh eselon 3,4 ke atas merujuk pada surat yang ditandatangani oleh menteri. Kemudian staf yang mengawaki ditandatangani oleh bapak sekjen. Perencanaan pengelolaan PCLS: terkait anggaran yang akan diturunkan tahun 2022, PCLS berharap besar anggaran yang diberikan dapat terealisasi namun ternyata nilai anggaran yang turun tidak sebesar yang diajukan. Sehingga perencanaan kegiatannya pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Fakta dari aspek kelembagaan sampai saat ini organisasi BCLS belum terbentuk sampai ada perpres. Setelah perpres maka akan dengan sendirinya organisasi PCLS akan beralih menjadi BCLS.

**KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS)
SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK STRATEGIS
DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA**

DATA RESPONDEN

- Nama : Irene Novri Amalia
- Posisi : Kasubbag Kelembagaan Baglem dan Anjab
- Lama Bertugas : 1 (satu) tahun
- Instansi : Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemhan RI

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Topik: Kesiapan, hambatan, dan upaya pembentukan PCLS dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara.

1. Apa itu PCLS dan tugas utama dari PCLS?

Jawaban: PCLS adalah embrio untuk organisasi BCLS dimana memang ketika membentuk BCLS tugasnya itu untuk mewujudkan ketersediaan pangan guna untuk mendukung ketahanan negara.

2. Kenapa PCLS dibuat?

Jawaban: Karena permintaan dari pemerintah, karena akan diberikan anggaran jadi harus ada organisasi sementara. Karena awalnya PCLS adalah hibah dari kementerian PUPR.

3. Bagaimana perencanaan organisasi PCLS?

Jawaban: Dalam surat KEP 65 telah tertera, tetapi itu hanya poin penting dari PCLS makanya ada fungsi pengelolaan sarana prasarana budidaya tanaman dan pertahanan dan itu semua nanti menjadi hal yang paling penting dan akan dirincikan kembali.

4. Kenapa PCLS diberikan izin ?

Jawaban: Diberi izin untuk perpres karena komoditinya hanya pada singkong yang berfokus pada *single product* saja tapi bisa diolah menjadi bermacam-macam cadangan seperti cadangan pangan farmasi dan cadangan bioenergi jadi komoditas yang hanya satu tetapi pemanfaatannya banyak.

5. Bagaimana proses bisnis PCLS?

Jawaban: Memang ranahnya adalah pangan tetapi untuk itu dikirimkan kepada satker yang mempercayai bahwa singkong juga bisa menjadi cadangan.

6. Apa saja kompetensi SDM yang diperlukan PCLS?

Jawaban: Pertama menyusun kebutuhan personil, kedua analisis pangan, selama personil masih bisa *dihandle* oleh orang dalam tetapi lebih baik dan kedepannya akan dihandle juga oleh orang luar atau yang berfokus di bidangnya atau ahli di bidangnya.

7. Apa ada koordinasi PCLS dengan organisasi atau K/L atau instansi lain?

Jawaban: Pastinya ada yaitu Kemnterian Kehutanan, tentang bagaimana proses pengalihan penggunaan yang semula hutan lalu dijadikan dengan lahan pangan itu perlu koordinasi dari kehutanan, yang kedua adalah dari pertanian, yaitu bagaimana bibit yang baik dan cara pengairan yang baik karena setiap tanah mungkin memiliki kadar air yang berbeda-beda.

8. Hambatan apa saja yang di tempuh oleh PCLS?

Jawaban: Dari segi organisasi PC LS merupakan embrio saja karena tujuan utamanya adalah BCLS, hambatannya diantaranya adalah satu peraturan per UU harus ada peraturan yang lebih tinggi tentunya seperti Perpres untuk payung hukum, yang kedua adalah Kemhan yang diakui oleh undang-undang dari sisi SDM yang berfokus pada internal saja tapi lebih baik ada bantuan dari eksternal yang dibutuhkan seperti pangan, bioenergi dan yang lebih

baik adalah pengaruh dari segi badan-badan dan lembaga yang ada.

9. Apakah ada pengaruh dari aspek politik hukum dan sosial?

Jawaban: Pastinya ada, yang pertama dari segi hukum menunggu persetujuan perpres BCLS, yang kedua adalah unsur politik, saya rasa dalam hal ini unsur politik itu tidak ada.

10. Faktor apa saja yang menghambat SDM PCLS?

Jawaban: Faktor yang menghambat adalah dasar hukum yang belum kuat yaitu Kepmen sedangkan pelaksanaan butuh lebih dari Kepmen.

11. Langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan SDM?

Jawaban: Karena pengajuan perpres sudah di meja presiden dan segala cara seperti harmonisasi dan seluruh upaya sudah dimaksimalkan kita hanya bisa memonitor apakah sudah ditandatangani presiden. Karena seluruh kewenangan itu full dari presiden bukan lagi dari menteri jadi hanya tinggal menunggu apakah perpres sudah ditandatangani atau belum.

12. Apakah masih ada peluang untuk perpres?

Jawaban: Tidak bisa diprediksi secara langsung karena tanda tangan presiden adalah full kewenangan presiden bukan lagi kementerian dan segala cara yang telah dilakukan. Dari organisasi ataupun rapat yang telah dilakukan kami yakin bahwa perpres akan disetujui cepat atau lambat.

PENELITIAN TESIS ANDI SUNRA
KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Narasumber

Nama Lengkap : Fauzal Muslim, MSc.
Posisi : Perencana Madya Bidang Hankam Bappenas
Lama Bertugas : 5 Tahun
Instansi : Bappenas

Pelaksanaan

Hari/tanggal/tahun : 25 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d. 09.15
Durasi : 15menit
Tempat : media telpon

Transkrip pertanyaan dan jawaban

Peneliti: *Food Estate* merupakan Program Nasional Tahun 2020-2024 apakah *Food Estate* yang dilaksanakan oleh Kemhan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Informan: *Food Estate* yang dilaksanakan oleh Kemhan tidak masuk dalam RPJMN Tahun 2020-2024, akan tetapi masuk dalam RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) Tahun 2022.

Tahun 2021 anggaran *Food Estate* Kemenhan belum masuk RKP Tahun 2021 karena proses perencanaan (penyusunan RKP) sudah berjalan pada awal tahun 2020, sementara perintah Presiden kepada Menhan pertengahan 2020 untuk mengelola *Food Estate* dengan komoditas singkong,

Anggaran *Food Estate* Kemenhan Tahun 2022 saat ini masih diblokir oleh Kemekeu karena belum ada perpres.

Peneliti : Apa yang membedakan *Food Estate* nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Pertanian dengan *Food Estate* yang akan dikelola oleh Kemhan.

Informan: *Food Estate* nasional, menangani komoditas, beras, jagung, kedelai, kentang dan lain-lain, sedangkan yang akan dikelola oleh Kemenhan adalah singkong, hanya singkong. Itulah yang membedakan *Food Estate* yang akan dikelola oleh kemenhan dengan K/L lainnya terutama Kementerian Pertanian.

Peneliti : Tahun 2022 anggaran *Food Estate* (kebun singkong dan pabrik) masih dalam kondisi diblokir karena terkendala Perpres yang belum ditandatangani oleh Presiden. Seandainya Perpres tidak juga ditandatangani pada tahun 2022 ini, apakah program *Food Estate* Kemhan tidak perlu dimasukkan masuk dalam Rencana Kebutuhan atau tahun 2023.

Informan: Secara kaidah, hasil evaluasi menjadi basis dalam proses perencanaan. Apabila kegiatan tersebut belum terlaksana di 2022, maka untuk tahun 2023 belum perlu dianggarkan.

PENELITIAN TESIS ANDI SUNRA
KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Narasumber

Nama Lengkap : Kolonel Cku Heri Setiawan, S.E., M.M.
Posisi : Kepala Bagian Perencanaan, Program dan
Anggaran Rorenku
Lama Bertugas : 1 Tahun
Instansi : Setjen Kemhan

Pelaksanaan

Hari/tanggal/tahun : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : 09.00 s.d. 09.15
Durasi : 15menit
Tempat : Kantor Rorenku Setjen Kemhan
Apakah ada file diterima : Ya / Tidak
Jika Ada, sebutkan :
Kode :

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Topik: Anggaran pembentukan PCLS dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara.

1. Bagaimana proses Kesiapan Penyediaan Anggaran PCLS?

Jawaban: PCLS dibentuk untuk mempercepat proses turunnya anggaran dimana syarat utama adanya anggaran adalah ada Satker dan Kode Satker yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam aplikasi Perencanaan/Penganggaran, Dengan adanya Kode Satker ini, proses perencanaan/penganggaran dapat berjalan. Sebenarnya Satker PCLS ini hanya sementara, nanti jika Perpres tentang Badan Cadangan Logistik Strategis ditandatangani Presiden maka PCLS otomatis akan berubah menjadi BCLS. Di akhir Tahun 2020 Menhan telah mengajukan anggaran kepada Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan petunjuk Presiden untuk mengelola *Food Estate* untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022, namun Tahun 2021 anggaran tidak turun karena masih dalam proses penyusunan Perpres. Anggaran Cadangan Logistik Strategis ditetapkan dalam RKP Tahun 2022, sehingga sambil menunggu Perpres diterbitkan secara Paralel penyusunan Perencanaan dan Penganggaran dapat dilakukan melalui aplikasi KRISNA maupun SAKTI dari Bappenas maupun Kemkeu. RKA Satker PCLS dapat diselesaikan dengan baik oleh staf dari PCLS.

2. Apakah Tahun 2022 PCLS dapat melaksanakan kegiatan walaupun Perpres belum ditandatangani Presiden?

Jawaban: Proses perencanaan dan penganggaran PCLS telah dilaksanakan dengan baik, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 telah diinput dalam aplikasi hingga akhirnya ditetapkan DIPA Satker PCLS, namun saat proses penelaahan RKA oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemkeu dan Bappenas, terhadap Anggaran PCLS diblokir sementara sampai dengan dasar hukumnya terbit yaitu ditandatanganinya Perpres.

Jadi DIPA PCLS Tahun 2022 sudah ada namun belum bisa digunakan sampai Perpres ditandatangani oleh Presiden.

3. Kesiapan lain terkait pelaksanaan Anggaran PCLS?

Jawaban: Jika Perpres sudah ditetapkan, anggaran sudah bisa dilaksanakan, dimana sejak awal tahun 2021 telah ditetapkan juga Pejabat Penantangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Perbendaharaan lainnya.

Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 juga sudah disusun oleh PCLS dan Sekjen Kemhan sudah mengusulkan ke Menhan dhi Dirjen Renhan untuk diajukan kepada Bappenas maupun Kemkeu

Untuk Tahun 2023.

4. Hambatan terkait Anggaran PCLS ?

Jawaban: Dari sisi anggaran yang diturunkan oleh Kemkeu saat ini belum bisa digunakan, walaupun Perpres ditetapkan oleh Presiden di Tahun 2022, pekerjaan akan terlambat tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya. Selain itu jumlah anggaran yang telah diturunkan jauh dari kebutuhan anggaran PCLS Tahun 2021 karena keterbatasan Anggaran dari Pemerintah.

5. Upaya yang dapat dilakukan?

Jawaban: Kami hanya bisa menunggu Perpres terbit, jika Perpres terbit akan memproses revisi anggaran untuk buka blokir untuk diajukan kepada Menhan untuk diteruskan kepada Menkeu. Upaya lain yang dilakukan adalah Rencana Kebutuhan Anggaran PCLS untuk Tahun 2023 telah disiapkan oleh satker PCLS dan sudah diajukan ke Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan.

PENELITIAN TESIS ANDI SUNRA
KESIAPAN PEMBENTUKAN PUSAT CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS (PCLS) SEBAGAI PENYUPLAI CADANGAN LOGISTIK
STRATEGIS DALAM Mendukung
Pertahanan Negara

Narasumber

Nama Lengkap : Sayusdi, S.Pd., M.Pd
Posisi : Kepala Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas
Hari/tanggal/tahun : Kamis, 2 Desember 2021
Waktu : 14.00 s.d. 14.30
Durasi : 30 menit
Tempat : Kantor Kecamatan Sepang Gunung Mas

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Topik: Tanggapan masyarakat terkait program *Food Estate* Kemhan

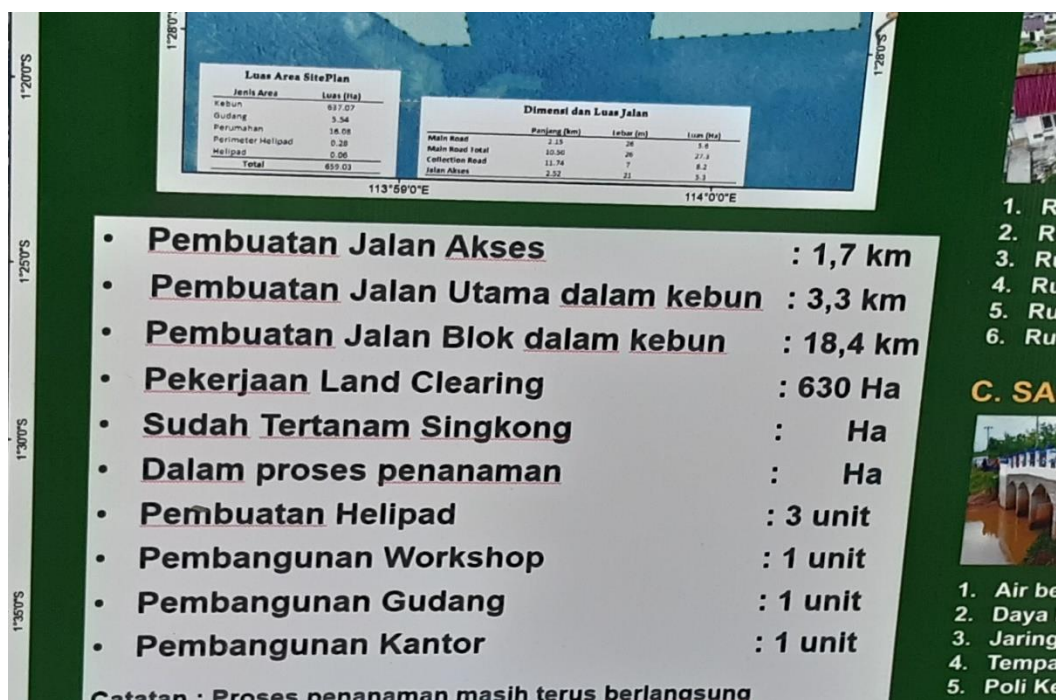
Pertanyaan: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program *Food Estate* (PCLS Kemhan) di Sepang dalam mewujudkan ketersediaan cadangan logistik strategis guna mendukung pertahanan negara?

Jawaban: menerima dengan baik, meskipun awalnya terdapat beberapa Orang yg menolak krn belum tau program *Food Estate*, namun setelah diadakan sosialisasi, pendekatan oleh Kemhan dhi Letkol inf. Sukajohan sitompul sebagai kepala Bidang Pengamanan dan Humas CLS Kemhan, masyarakat menerima keberadaan *Food Estate* Kemhan di Sepang, mereka berharap dgn adanya program tsb dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan bisa membuka pelangi kerja. Namun, akhir-akhir ini karena melihat tidak ada kegiatan lanjutan PCLS sepanjang tahu 2021, sebagian masyarakat menganggap program *Food Estate* Kemhan produk gagal.

B. DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN











RIWAYAT HIDUP



Andi Sunra, lahir di Ujung Pandang, 3 September 1974 merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan H. Andi Rumpang dan Hj Amirah. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 4 Kalenrunge Watan Soppeng (1981-1987), SMP Negeri 12 Makassar (1987-1990), SMA Negeri 5 Makassar (1990-1993), strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar (1994-2000). Menikah dengan Endah Setiyaningsih pada Tahun 2004 dengan anak Andi Faathirah Batari Ugie (2005), Andi Firzanah Bungawali (2008) dan Andi Hanifah Tenri Awaru.

Setelah lulus Pendidikan S1 pada Tahun 2000, Penulis bergabung pada Pendidikan Sekolah Pertama Perwira Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI) dan menjalani pendidikan selama kurang lebih tujuh bulan di Akmil Magelang Jawa Tengah (Desember 2000 - Juni 2001). Mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Keuangan Angkatan Darat di Pusat Pendidikan Keuangan Kodiklat TNI AD selama enam bulan (Juni-Desember 2001). Setelah menjalani pendidikan, Penulis bertugas di Bagian Keuangan Roudhotul Setjen Departemen Pertahanan (2002-2005), selanjutnya karena terjadi validasi organisasi di Kemhan, penulis bertugas di Pusku Kemhan (2005-2010). Awal Tahun 2011 penulis dimutasi ke Universitas Pertahanan (Unhan) dan bekerja selama empat tahun (2011-2014), selanjutnya dimutasi lagi ke Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Subbagian Program dan Anggaran Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan.